

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Arthashastra merupakan kompendium yang disusun oleh Acharya Chanakya pada akhir abad ke-4 SM. Risalah mengenai politik dan kesejahteraan ini telah meletakkan dasar-dasar nilai yang dapat dipergunakan sebagai sebuah grand strategi hingga masa kini. Sejumlah gagasan dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya dipandang masih relevan dengan aplikasi politik internasional saat ini. Konsep mengenai diplomasi pertahanan dalam Arthashastra diperoleh melalui analisa hermeneutik terhadap beberapa gagasan-gagasan Chanakya, khususnya terkait pemetaan ancaman (*mandala* teori), *statecraft* (*saptanga* teori) dan juga teori diplomasi (teori *Mantrashakti*, *Ṣāḍgunya* dan *catur upaya*). Konsep Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan Chanakya berada pada spektrum Paradigma realisme yang bersifat *military heavy*.

Pola Penetapan ancaman dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya menitik-beratkan pada sifat-sifat ancaman yang militeristik, sehingga hanya terkooptasi pada ancaman yang bersifat tradisional semata. Sifat ancaman yang tradisional inipun disikapi dengan cara-cara yang juga tradisional atau militeristik. Keadaan konsep pada Arthashstra karya Chanakya yang terlalu *militeristic oriented* inilah yang kemudian membuat konsep tersebut tidak bisa serta-merta diaplikasikan dalam strategi diplomasi pertahanan masa kini. Karena saat ini ancaman telah terproliferasi sedemikian luas. Ancaman tidak lagi bersifat tradisional/ militeristik semata, namun telah berkembang menjadi ancaman non-tradisional pula. Maka dari itu, ketika ingin mengaplikasikan pemikiran Chanakya yang terdapat dalam konsep-konsep di Pustaka Arthashastra saat ini, diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu, terutama terkait dengan strategi menghadapi ancaman non militer/ non tradisional.

Konsep Mandala sesungguhnya dapat dijadikan dasar strategi dalam melakukan diplomasi pertahanan. Konstelasi geopolitik negara dalam teori mandala mengharuskan sebuah negara mengidentifikasi mana negara yang dapat menjadi musuh alami, musuh potensial, sekutu dekat, ataupun sekutu jauh. Negara mana yang dapat memenuhi syarat sebagai *mitra* (rekan kerja/ sekutu), negara mana yang berpotensi untuk berselisih pendapat dalam sebuah isu. Dengan demikian negara dapat melihat secara holistik negara mana yang perlu di-*lobby* lebih keras karena posisinya akan bersebrangan dan negara mana yang sudah bisa dipastikan akan berada dipihaknya.

Konsep Tata Pemerintahan (*Statecraft*) dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya dijabarkan ke dalam seni dalam memaksimalkan kekuatan negara melalui tujuh elemen pembentuk negara (*saptanga*). Ketujuh elemen ini yakni *Swamin* (Pemimpin negara); *Amatya* (anggota dewan/mereka yang mewakili institusi negara); *Janapada* (sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk); *Durg* (Ibukota yang dibentengi); *Kosa* (Perbendaharaan); *Danda/Bala* (Angkatan bersenjata/ militer); dan *Mitra* (teman dan sekutu negara). Chanakya menggambarkan ketujuh elemen pembentuk negara itu sebagai eksposisi dari teori Mandala (*circle of state*) yang kemudian membentuk dasar dari kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori atau penaklukan teritori.

Sebagian besar elemen ini masih relevan hingga saat ini, namun ada satu elemen yang perlu diinterpretasikan kembali seiring dengan perkembangan zaman, dan teknologi. Pada zaman kerajaan, pusat data dan pemerintahan berada di ibukota, sehingga keberadaan benteng di ibukota menjadi sangat krusial sebagai bagian dari pertahanan. Namun konteks zaman sekarang benteng yang diperlukan bukanlah berbentuk fisik lagi, terlebih karena keberadaan data-data negara dengan adanya

teknologi digital, tidak lagi hanya disimpan dalam bentuk fisik (data di atas kertas) saja, namun juga dalam bentuk data digital.

*Saptanga* teori yang dikemukakan oleh Chanakya ini dapat menjadi sebuah bagian integral yang penting dalam strategi diplomasi pertahanan. Hal ini disebabkan karena elemen dalam *saptanga* dapat terukur secara agregat sebagai sebuah kekuatan negara. Dengan demikian hal ini tentu dapat dijadikan alat teoretis yang baik untuk analisis intelejen. Karena analisis intelejen sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Utamanya mengenai kawan ataupun lawan yang akan diajak bekerjasama dalam kerangka diplomasi pertahanan negara

Konsep Diplomasi dalam Arthashastra karya Chanakya dijabarkan sebagai *Mantrashakti*, kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan dan kekuatan narasi manusia termasuk perkataan dan tulisan. Dalam memperoleh mantrashakti ini Chanakya kemudian menetapkan enam kebijakan luar negeri (*Ṣāḍguṇya*) dan empat upaya (*Catur Upaya*) untuk melancarkan diplomasi. *Ṣāḍguṇya* teori ini merupakan enam kebijakan yang diterapkan oleh negara sesuai dengan keadaan lingkungan strategis dari negara tersebut terhadap negara-negara lain dalam lingkup percaturan politik internasional. Keenam kebijakan itu antara lain: *saṃdhi*, *vigraha*, *asana*, *yana*, *samsraya* dan *dvaiddibhava*. Sementara jika terkait dengan aplikasi dan pendekatan dari diplomasi itu sendiri, Chanakya menjabarkannya ke dalam *Catur Upaya*, yaitu: *sama*, *dama*, *bedha*, *danda*.

Konsep Diplomasi menurut Pustaka Arthashastra karya Chanakya dijabarkan dalam konsep *Mantrashakti* sebagai kekuatan ucapan, narasi lisan maupun tulisan untuk mencapai tujuan negara. *Mantrashakti* menurut Pandangan Chanakya dalam Pustaka Arthashastra merupakan bagian integral dan paling penting dari kekuatan yang harus dimiliki negara. Konsep *Mantrashakti* dapat menjadi paradigma dasar dalam diplomasi pertahanan di mana diplomasi diletakkan sebagai salah satu kekuatan terpenting yang harus dimiliki secara mumpuni oleh sebuah negara.

Diplomasi digunakan sebagai *first line* dan *last line of defense* yang di ejawantahkan dalam kebijakan luar negeri terhadap negara-negara yang ada dalam perpolitikan internasional. *Sam̐dhi*, *dvaiddibhava*, *samsraya*, dan *asana* digunakan sebagai *first line* (upaya *preventive*) untuk menggalang kekuatan dan memastikan negara lain tidak menyerang/bersebrangan dengan negara sang *vijigīṣu*. Sementara *Sam̐dhi* dan *samsraya* dapat digunakan sebagai *last defense* ketika perang tidak dapat dielakkan dan kedamaian diupayakan untuk mengurangi efek destruktif dari perang terhadap masyarakatnya. Dalam melaksanakan poin-poin *Ṣādgunya* ini, catur upaya dijalankan melalui *sama*, *dama*, *bedha*, dan *danda*.

Sejumlah teori-teori klasik India, termasuk Chanakya Arthashastra relevan untuk dijadikan pijakan dan teori dasar dalam membangun pertahanan negara dan Diplomasi Pertahanan Indonesia. Konsep mantrashakti, mayashakti maupun teori politik mandala harus dipertimbangkan sebagai pijakan yang baik dalam membangun maupun memperkuat Pertahanan Negara Indonesia.

Konsep politik luar negeri bebas aktif, sejalan dengan konsep Veda yang berupa filsafat kewajiban moral untuk membangun masyarakat dunia, menjaga *bhumi* sebagai pertiwi yang suci bagi manusia. Dalam diplomasi Pertahanan, penggunaan konsep *mantrashakti* dan *mayashakti* semestinya menjadi penentu kemenangan Diplomasi Pertahanan Indonesia, walau untuk membangunnya tidak mudah dan memerlukan waktu.

## 5.2 Rekomendasi

1. Kepada Penstudi dan pemerhati Ilmu Pertahanan dan Hubungan Internasional, peneliti merekomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang risalah Arthashastra guna memperkaya khasanah Ilmu pertahanan non-western. Terkait dengan pola penetapan ancaman selayaknya Pemerintah dapat menerapkan nilai-nilai yang terdapat

pada pandangan Chanakya dalam Arthashastra berupa kewaspadaan dan juga upaya untuk memperkuat kekuatan militer negara, seperti dengan meningkatkan rasio *military expenditure* dalam APBN.

2. Bagi para penstudi Diplomasi Pertahanan, pengkajian konsep Diplomasi Pertahanan dalam pandangan Chanakya pada Pustaka Arthashastra memberikan horizon baru *non-western oriented*, di mana selama ini, pendekatan yang digunakan banyak didominasi dalam kerangka *western oriented*. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal guna melakukan penelitian lebih lanjut untuk benar-benar dapat diterapkan menjadi kajian keilmuan dalam Diplomasi Pertahanan. Terkait dengan konsep *statecraft* atau tata pemerintahan, Pemerintah Indonesia selayaknya dapat menjadikan nilai-nilai dalam konsep saptanga berupa upaya penguatan tujuh elemen negara (pemimpin negara; pemerintah/parlemen; wilayah dan populasi; infrastruktur dan teknologi; perekonomian dan perbendaharaan; militer dan angkatan bersenjata; dan teman/ aliansi/ mitra kerjasama) guna mencapai kekuatan nasional yang komprehensif.
  
3. Bagi para Diplomat dan anggota parlemen yang bertugas dalam ranah hubungan luar negeri, pertahanan dan Diplomasi, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan guna memperkaya berbagai strategi, metode maupun pengetahuan dalam pertahanan negara dan hubungan luar negeri. Pengetahuan ini menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan wacana dan diplomasi (*mantrashakti*) dan kekuatan intelektual (*intellectual investment*), keluasan wawasan di mata internasional.

